

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menggeserkan media massa konvensional ke arah media massa daring. Seperti adagium *“Das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke* (hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat), maka berkembanglah suatu konsep di bidang hukum siber, yaitu konsep hak untuk dilupakan. Konsep ini lahir dari keinginan untuk mengembalikan fungsi kontrol atas informasi pribadi yang beredar di internet kepada pribadi masing-masing orang. Di Indonesia, konsep ini diadopsi dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dengan menggunakan media massa elektronik, seseorang dapat mencari dan membaca suatu berita yang terjadi di masa lalu dengan mudah. Namun, terkadang pihak penyelenggara sistem elektronik dapat merugikan pihak yang diberitakan dalam menyajikan suatu berita tersebut. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers telah memberikan jaminan kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah, meliputi asas hukum, kaedah, peraturan hukum konkret. Spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang ditemukan pada saat penelitian dilaksanakan, yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Tahapan penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan untuk memperoleh sata sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai kasus-kasus yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hak untuk dilupakan dapat diterapkan pada pemberitaan yang memuat data pribadi dan/atau informasi pribadi korban tindak pidana, karena terdapat hak bagi setiap korban untuk terbebas dari setiap stigma negatif. Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) Perubahan UU ITE ini merupakan wujud pembatasan atas kemerdekaan pers yang bersumber dari kekuasaan publik. Namun, hingga saat ini konsep hak untuk dilupakan ini masih belum efektif dan belum bisa diterapkan karena belum dibuatnya peraturan pemerintah yang mengatur tentang tata cara penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Kata Kunci : *Informasi Dan Transaksi Elektronik, Kemerdekaan Pers , Hak Untuk Dilupakan*

ABSTRACT

The rapid development of information technology has shifted conventional mass media towards online mass media. As the adage “*Das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke*” (the law was not made, but grew and developed with the community), then a concept in the field of cyber law developed, namely the concept of the right to be forgotten. This concept was born from the desire to restore the control function of personal information circulating on the internet to each person's personal. In Indonesia, this concept was adopted in Article 26 section (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. By using electronic mass media, one can easily search and read news that happened in the past. However, sometimes the organizers of electronic systems can harm those reported in presenting such news. On the other hand, Law Number 40 of 1999 concerning the Press has given freedom of press guarantees as citizen's human rights.

In this research, the author uses the normative juridical research method because the target of this study is law or method, including the principles of law, methods, concrete legal rules. The research specification uses a descriptive analytical method that is by focusing on the problems that are found at the time the research is carried out, which are then processed and analyzed to draw conclusions. The stages of the research used were library studies to obtain secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique used in this study is the study of documentation by collecting data and information on cases that are subject to study in this research.

The results of the study concluded that the right to be forgotten can be applied to reports containing personal data and/or personal information of victims of crime, because there is a right for each victim to be free from any negative stigma. Provisions in Article 26 section (3) Amendment to the ITE Law is a form of restriction on press freedom sourced from public authority. However, until now the concept of the right to be forgotten is still ineffective and cannot be applied because there are no government regulations that govern the procedure for deleting electronic information and/or electronic documents.

Keywords : *Electronic Information and Transactions, Freedom Of Press, Right To Be Forgotten*